

## **BAB II**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis Kota Batam**

Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran Internasional yang jaraknya 12,5 mil laut dengan negara tetangga Singapura, sehingga dapat menempatkan Kota Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi baik Propinsi Kepri maupun Nasional.

Wilayah Kota Batam terdiri dari 329 pulau besar dan kecil, yang letaknya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan laut. Luas Wilayah Kota Batam keseluruhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 adalah 1.570.35 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratesier yang membentang dari semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur serta Karimun di bagian Selatan.<sup>1</sup>

Kota Batam secara administrative berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun. Batas-batas wilayah meliputi, sebelah Utara dengan Selat Singapura, sebelah Timur dengan Kecamatan Bintan Utara, Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau, sebelah Selatan dengan Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Moro, Karimun Kabupaten Karimun.

Permukaan tanah Kota Batam umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi sedikit berbukit-bukit, berbatu muda dengan bouksit, ketinggian maksimum 160 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari perputaran arus, perairan Kota Batam yang berada di Selat Malaka

---

<sup>1</sup>Profil Batam, 2012, h.10

ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikanan yang dipengaruhi oleh gerakan air dari Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan yang melewati Selat Malaka.

Wilayah Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 20,4o – 23o C, dan suhu maksimum sepanjang tahun berkisar antara 30,4o – 33 o C, sedangkan tekanan udara rata-rata minimum 1005,6 MBS dan maksimum 1013,8 MBS. Kecepatan angin maksimum hari hujan rata-rata perbulan 15 hari, dengan rata-rata curah hujan perbulannya 154,4m. Kelembaban udara di wilayah Kota Batam rata-rata adalah 19% hingga 78%.<sup>2</sup>

Kota Batam yang berada di wilayah kepulauan dan dihubungkan oleh perairan membuat kehidupan masyarakatnya sangat bergantung dengan sarana air, wilayah Batam banyak terdapat penduduk yang menamakan diri mereka orang pulau, artinya mereka adalah orang-orang yang tinggal di pulau yang dikelilingi oleh laut. Kehidupan mereka sangat bergantung dengan hasil yang didapatkan dari melaut. Laut atau air begitu akrab dengan kehidupan masyarakat tempatan dan berbeda dengan masyarakat pendatang, yang menuju Batam untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan demikian pemeliharaan laut merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Batam, karena cukup banyak jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan laut. Karena Batam termasuk wilayah pulau, maka wilayah ini tentu saja banyak mempunyai sungai.

## **B. Sejarah Pengembangan Batam**

### **1. Pembentukan Kota Batam**

Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam, wilayah ini pada mulanya merupakan suatu wilayah Kecamatan Batam yang termasuk ke dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau. Pembentukan Pulau Batam dari wilayah kecamatan menjadi Kotamadya

---

<sup>2</sup>Profil Batam, 2012, h.15

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1983, dengan cakupan wilayah pemerintahan dibagi dalam tiga kecamatan, yakni Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat, dan Batam Timur.<sup>3</sup>

Perubahan status tersebut merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sedangkan motivasi dibentuknya Kotamadya Batam, tidak lain adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan tuntutan pembangunan sebagai akibat makin berkembangnya wilayah Pulau Batam sebagai daerah industri, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata.

## 2. Otorita Pembangunan Daerah Industri

Pada Tahun 1969 semasa Letjen (Purn) Dr.H.Ibnu Sutowo menjabat sebagai direktur utama Pertamina, Pulau Batam ditetapkan sebagai Basis Logistik dan Operasional untuk industri yang berkaitan dengan eksploitasi dan gas bumi di lepas pantai. Melalui Keppres Nomor 65 Tahun 1970, Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai penanggungjawab terutama yang menyangkut penggunaan biaya pembangunan proyek yang anggaran disisihkan dari anggaran Pertamina.

Kemudian berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri, dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai Ketua Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB). Wilayahnya meliputi beberapa pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, Pulau Moi Moi, dan Pulau Kasem.<sup>4</sup>

Tahapan selanjutnya dengan Keppres Nomor 33 Tahun 1974 dibentuk beberapa kawasan berikat (Bonded Zone).Pemerintah menunjuk PT. Persero Batam sebagai pengusaha Bonded

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Zone di Sekupang dan Batu Ampar. Ketika terjadi resesi di tubuh Pertamina Tahun 1975, pemerintah mengambil alih tanggungjawab pembangunan di Pulau Batam. Pada saat itu Presiden menetapkan Dr. JB. Sumarlin sebagai Ketua Otorita Batam menggantikan Ibnu Sutowo. Di tangan Sumarlin beberapa Keputusan Menteri dikeluarkan guna memberikan dukungan terhadap pembangunan Pulau Batam dan sekitarnya.

Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 77 Tahun 1977 tanggal 18 Februari 1977, memberikan hak pengelolaan atas seluruh areal yang terletak di Pulau Batam termasuk tanah gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Pulau Kasem dan Moi-Moi. Kemudian Menteri Perhubungan dengan keputusan Nomor 119 Tahun 1977 mengizinkan Otorita Pembangunan Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Nongsa dan Kabil. Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melimpahkan wewenang kepada otorita untuk mengurus dan menilai permohonan calon investor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).<sup>5</sup>

Dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1978 seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai kawasan Berikat (Bonded Zone). Berdasarkan Keppres Nomor 194 Tahun 1978, mengangkat Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sebagai Ketua Otorita Batam, dan Brigjen TNI Soedarsono Dharmosoewito sebagai Kepala Badan Pelaksana. Sepuluh tahun kemudian digantikan oleh Laksamana Pertama Soepandi, dan tugas beliau selanjutnya digantikan oleh Laksamana Pertama Soryohadi Djatmiko, SE.

### 3. Barelang (Batam, Rempang, Galang)

Tahun 1992 melalui Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, kawasan industri Pulau Batam dengan status kawasan Berikat diperluas ke Pulau Rempang dan Galang, yang lebih dikenal dengan sebutan Barelang singkatan dari Batam, Rempang, Galang.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Pulau Rempang dan Galang merupakan salah satu pulau di Kecamatan Galang yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dengan luas wilayah Pulau Rempang sekitar 168 Km<sup>2</sup> dan luas Pulau Galang 80 Km<sup>2</sup> serta Pulau Galang Baru 32 Km<sup>2</sup>. Dasar pemikiran penambahan wilayah ini tidak lain karena semakin meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam.

Untuk penggabungan Pulau Rempang dan Galang, pemerintah telah membangun enam buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam-Pulau Tonton, Pulau Tonton-Pulau Nipah, Pulau Nipah-Pulau Setokok, Pulau Setokok-Pulau Rempang, Pulau Rempang-Pulau Galang.<sup>6</sup>

### **C. Penduduk**

Masalah ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dengan masalah kependudukan. Penduduk yang cukup besar jumlahnya merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja. Namun demikian sebaliknya pertumbuhan penduduk yang besar dapat pula menimbulkan permasalahan. Sebelum terjadi revolusi industri di Eropa, Malthus, pernah mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak terhadap kekurangan pangan dan kerusakan lingkungan disusul dengan peperangan dan wabah penyakit.

Tercatat samapi pada bulan Juni Tahun 2005 penduduk Kota Batam telah mencapai 636.729 jiwa, yang terdiri dari 296.746 jiwa (46,60%) laki-laki dan 329.367 jiwa (53,40%) perempuan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 90.1. Lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki disebabkan oleh sebagian perusahaan industri terutama industri elektronik lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan baik melalui program AKAD maupun pekerja yang langsung diterima oleh pihak perusahaan di daerah ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Profil Batam, 2012, h.83

Dari hasil registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam diperoleh informasi jumlah penduduk Kota Batam keadaan Juni Tahun 2005 sebanyak 636.729 jiwa, yang berarti meningkat sebesar 6,67 persen atau bertambah sebanyak 45.476 jiwa disbanding keadaan akhir Tahun 2004. Kecenderungan mulai melambatnya pertumbuhan penduduk daerah ini pada Tahun 2005 dibanding tahun-tahun sebelumnya diduga erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di Kota Batam yang tidak sekondusif seperti tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu penerapan Perda tentang kependudukan dan tingkat biaya hidup yang terus mengalami peningkatan merupakan pertimbangan tersendiri bagi penduduk yang akan bermigrasi ke daerah ini.

Sedangkan penyebaran penduduk per kecamatan di Kota Batam dapat dikatakan tidak merata dengan konsentrasi masih pada kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sei Beduk, Sekupang dan Batu Ampar dengan konsentrasi masing-masing sebesar 22,21 persen, 21,89 persen dan 19,94 persen. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Nongsa dan Lubuk Baja yang berada pada urutan keempat dan kelima terbesar kontribusinya yaitu 19,20 persen dan 13,30 persen dari jumlah seluruh penduduk daerah ini. Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bulang.<sup>8</sup>

Tingginya arus migrasi di Kota Batam tentu saja merupakan persoalan tersendiri bagi Pemko Batam, karena dengan banyaknya pendatang (migran) akan menimbulkan berbagai dampak sosial kemasyarakatan. Apalagi para pendatang tersebut tidak memiliki pendidikan yang memadai ataupun keahlian yang dapat dihadirkan. Hal ini tentu saja berdampak bagi tingginya angka pengangguran dan berbagai kejahatan kriminal lainnya. Di samping itu juga munculnya rumah-rumah liar di daerah-daerah pinggiran jalan yang dijadikan sebagai tempat mereka mencari nafkah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Dari hasil observasi di lapangan terlihat dengan jelas bahwa orang-orang yang membangun perumahan liar di Kota Batam, meskipun sudah ada tempat untuk menampung rumah liar, adalah para pendatang dengan tingkat ekonomi lemah. Hal ini tentu saja membuat pemandangan Kota Batam tidak menjadi indah dan tidak jarang juga menimbulkan kerawanan sosial.

Untuk menata Kota Batam maka pihak Otorita Batam mengambil kebijakan untuk menyediakan lahan pemukiman bagi masyarakat yang membangun rumah liar. Wilayah penampungan bagi masyarakat tersebut terdapat di Kecamatan Sungai Beduk yang dikenal dengan sebutan Dapur 12. Pemerintah Otorita Batam menyediakan lahan pemukiman yang dibagikan kepada masyarakat dengan harga yang rendah (terjangkau), agar masyarakat membangun rumah di pemukiman baru tersebut.

Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat gusuran membangun rumah di pemukiman baru, ada yang menjualnya dan kemudian pulang kampung, ada juga yang menukarkan dengan keluarganya, dan ada juga yang masih tetap membangun rumah liar. Sebagian masyarakat yang kembali bermukim di perumahan liar kebanyakan beralasan bahwa sulit mencari pekerjaan atau jauh dari tempat kerja.

Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang dipindahkan pada tahap awal, karena kesulitan transportasi. Tetapi pada saat sekarang ini kendala ini sudah tidak begitu dirasakan lagi. Dengan demikian, masyarakat yang menetap di daerah pemukiman baru tidak semuanya berasal dari daerah gusuran, tetapi ada juga yang berasal dari masyarakat yang membeli lahan tersebut dan kemudian membangunnya.

